



BAPPEDA



LAPORAN

DAMPAK ALOKASI DANA DESA TERHADAP PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DI KECAMATAN SYIAH KUALA KOTA BANDA ACEH

**KERJASAMA
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
DENGAN
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN) AR-RANIRY
TAHUN 2019**

ISSN :

TIM PENYUSUN

**DAMPAK ALOKASI DANA DESA TERHADAP PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DI
KECAMATAN SYIAH KUALA KOTA BANDA ACEH**

1. Ir. Gusmeri , MT
2. Dr. Zaki Fuad, M.Ag
3. Nila Herawati, SE, M.Si
4. Parmakope, SE, MM
5. Marwiyati, SE,MM
6. Dr.Laila Wijaya, SP,M.Env.plan
7. Bustami

Dilarang mengumumkan, mendistribusikan , mengkomunikasikan, dan/atau menggandakan sebagian atau seluruh isi buku ini untuk tujuan komersial tanpa izin tertulis dari Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Banda Aceh

KATA PENGANTAR

Segala puji dan syukur atas kehadiran Allah SWT dengan rahmat dan karunia-Nya karya ilmiah ini dapat terselesaikan dengan baik. Shalawat dan salam kepada Nabi Muhammad SAW beserta keluarga dan sahabatnya yang telah menjadi tauladan bagi sekalian manusia dan alam semesta.

Kami berharap laporan survey “**Dampak Alokasi Dana Desa Terhadap Pemberdayaan Perempuan di Kota Banda Aceh** (Studi kasus di Kecamatan Syiah Kuala)” dapat bermanfaat bagi semua pihak terkait, khususnya dalam pelaksanaan perencanaan program kegiatan pembangunan dan pemberdayaan di Kota Banda Aceh.

Penyusun menyadari bahwa masih terdapat kekurangan maupun kesalahan dalam penyusunan laporan ini sehingga penyusun mengharapkan kritik dan saran yang bersifat membangun untuk perbaikan di masa yang akan datang dari seluruh pembaca.

Banda Aceh, November 2019

Tim Penyusun

ABSTRAK

Judul Penelitian : Dampak Alokasi Dana Desa Terhadap Pemberdayaan Perempuan di Kota Banda Aceh (Studi kasus di Kecamatan Syiah Kuala)

Perempuan merupakan sumber daya manusia yang memiliki potensi yang besar yang dapat digunakan dalam berbagai bidang sektor pembangunan nasional. Dengan terlibatnya peran wanita dalam proses pembangunan ekonomi desa yang didukung oleh peran pemerintah diharapkan perekonomian desa tersebut dapat tumbuh lebih cepat dan dapat mensejahterakan masyarakatnya. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana dampak alokasi dana desa terhadap pemberdayaan perempuan di kota Banda Aceh. Jenis penelitian ini adalah penelitian deskriptif dengan metode kualitatif. Informan penelitian ini adalah aparatur desa dan perempuan kecamatan Syiah Kuala yang menerima manfaat dari dana desa. Pengumpulan data dilakukan dengan observasi dan wawancara. Hasil dari penelitian ini adalah pengalokasian dana desa untuk program pemberdayaan perempuan mendatangkan banyak manfaat positif terhadap masyarakat khususnya perempuan. Faktor-faktor yang mendukung jalannya program pemberdayaan perempuan yaitu partisipasi masyarakat serta sarana dan pra sarana. Faktor-faktor penghambat jalannya program pemberdayaan perempuan adalah sumber daya manusia, keterbatasan waktu, mindset masyarakat, keterbatasan anggaran, dan sulitnya pelaporan.

Kata Kunci : Alokasi Dana Desa, Pemberdayaan Perempuan

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR.....	i
ABSTRAK	ii
DAFTAR ISI.....	iii
DAFTAR GAMBAR.....	v
DAFTAR TABEL	vi
DAFTAR LAMPIRAN	vii
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Rumusan Masalah	7
1.3 Tujuan Penelitian	7
1.4 Manfaat Penelitian.....	8
BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	9
2.1 Alokasi Dana Desa	9
2.2 Konsep Pemberdayaan.....	11
2.2.1 Pengertian Pemberdayaan	11
2.2.2 Tahapan atau Proses Pemberdayaan	11
2.2.3 Indikator Keberdayaan	14
2.3 Pemberdayaan Perempuan.....	16
2.3.1 Program Pemberdayaan Perempuan di Bidang Ekonomi.....	20
2.4 Penelitian Terdahulu	22
BAB III METODOLOGI PENELITIAN.....	24
3.1 Jenis Penelitian.....	24
3.2 Lokasi Penelitian.....	24
3.3 Waktu Penelitian	24
3.4 Objek Penelitian	24
3.5 Jenis dan Sumber Data	25
3.6 Teknik Pengumpulan Data	25
3.7 Definisi Operasional Variabel	26
BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN	27
4.1 Gambaran Umum Kecamatan Syiah Kuala	27
4.1.1 Luas Desa Kecamatan Syiah Kuala.....	27
4.1.2 Batas-Batas Desa Kecamatan Syiah Kuala	27

4.1.3 Jumlah Penduduk Kecamatan Syiah Kuala	29
4.1.4 Visi Misi Kecamatan Syiah Kuala	30
4.2 Penerimaan Dana Desa Kecamatan Syiah Kuala	30
4.3 Penggunaan Dana Desa di Kecamatan Syiah Kuala	31
4.4 Pengalokasian Dana Desa Untuk Program Pemberdayaan Perempuan	33
4.5 Faktor Pendukung Dan Penghambat Jalannya Program Pemberdayaan Perempuan.....	37
4.5.1 Faktor pendukung	37
4.5.2 Faktor Penghambat.....	39
4.6 Harapan.....	41
BAB V KESIMPULAN DAN SARAN	43
5.1 Kesimpulan.....	43
5.2 Saran	43
DAFTAR PUSTAKA	44
LAMPIRAN.....	45
Lampiran 1	45
Lampiran 2	46

DAFTAR GAMBAR

Gambar 4.1 Jumlah Penerimaan Dana Desa Kecamatan Syiah Kuala.....	31
---	----

DAFTAR TABEL

Tabel 1.1 Rincian Jumlah Dana Desa Menurut Provinsi di Pulau Sumatera	2
Tabel 1.2 Rincian Alokasi Dana Desa Menurut Kabupaten di Aceh	5
Tabel 4.1 Data luas desa kecamatan Syiah Kuala	27
Tabel 4.2 Batas-Batas Desa Dalam Kecamatan Syiah Kuala	29
Tabel 4.3 Data Jumlah Penduduk kecamatan Syiah Kuala	29
Tabel 4.4 Penggunaan Dana Desa di Kecamatan Syiah Kuala.....	33

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1	45
Lampiran 2	46

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Indonesia merupakan negara kesatuan yang terdiri dari 34 Provinsi yang tersebar dari ujung Barat hingga Timur Indonesia, yang memiliki 415 kabupaten, 1 kabupaten administrasi, 93 kota, dan 5 kota administrasi. Menurut Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 56 tahun 2015 tentang Data Wilayah Administrasi Pemerintahan disebutkan bahwa jumlah desa dan kelurahan di Indonesia adalah 83.184 (74.754 desa + 8.430 kelurahan).

Pada sistem yang ada dan berlaku saat ini, desa mempunyai wewenang yang penting dalam membantu pemerintah daerah dalam bidang pemerintahan, termasuk pembangunan. Semua ini dilakukan sebagai langkah nyata pemerintah dalam mendukung pelaksanaan otonomi daerah. Proses desentralisasi yang telah berlangsung telah menumbuhkan kesadaran tentang pentingnya kemandirian daerah yang berpacu pada potensi lokal. Secara esensi kemandirian harus dimulai dari level pemerintahan yang paling bawah yaitu desa. Dengan ruang lingkup yang lebih kecil jika dibandingkan dengan pemerintah kabupaten, pemerintah desa diyakini lebih mampu melihat setiap kebutuhan yang harus lebih diprioritaskan. Salah satu program pemerintah dalam mendukung pembangunan desa adalah dengan mengeluarkan dana desa sebagai salah satu sumber pendapatan desa.

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 telah menempatkan desa sebagai ujung tombak pembangunan dan peningkatan kesejahteraan masyarakat. Setiap tahun pemerintah pusat telah menganggarkan dana desa yang cukup besar untuk diberikan kepada desa. Desa diberikan kewenangan dan dana yang memadai agar dapat mengelola potensi yang dimilikinya guna meningkatkan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat.

Provinsi Aceh dengan keistimewaannya memiliki qanun nomor 5 tahun 2003 tentang Pemerintah Gampong. Untuk menyetarakan pembangunan desa dengan kota, diperlukan kerja keras dari berbagai unsur yang ada seperti

pemerintah daerah, unsur desa, serta masyarakat itu sendiri. Tujuan dari pembangunan adalah untuk menjamin sebuah pembangunan sehingga mejadikan taraf hidup masyarakat desa menjadi lebih baik.

Nama Daerah	Dana Desa 2017
Aceh	4.898.571.795
Sumatera utara	4.197.972.490
Sumatera barat	796.538.971
Riau	1.269.305.925
Jambi	1.090.940.601
Sumatera Selatan	2.267.261.445
Bengkulu	1.035.340.413
Lampung	1.957.487.721
Bangka Belitung	265.661.579
Kepulauan Riau	513.958.123

Sumber : Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan Tahun 2017

Tabel 1.1

Rincian Jumlah Dana Desa Menurut Provinsi di Pulau Sumatera

Tahun Anggaran 2017

(Dalam Ribuan Rupiah)

Berdasarkan data yang diperoleh dari Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan anggaran jumlah dana desa yang didapatkan oleh provinsi Aceh menjadi penerima anggaran dana desa tertinggi di Pulau Sumatera. Dalam beberapa literatur disebutkan bahwa besarnya jumlah anggaran dana desa yang diterima oleh Aceh belum mampu sepenuhnya mensejahterakan masyarakat. Salah satu hal yang menyebabkan ini terjadi adalah kurang optimalnya pengelolaan dari fungsi dana itu sendiri. Dana desa banyak dilimpahkan untuk pembanguan fisik desa dan sedikit yang digunakan untuk pemberdayaan masyarakat khususnya para pekerja perempuan. Padahal jika kita melihat pada apa yang diamanatkan melalui dana desa ini, tujuan utama dana desa tidak hanya pada program pembagunan saja, tetapi program pemberdayaan juga menjadi fokus utama dari tujuan dana desa. Peran pemerintah desa dalam hal ini menjadi kunci bagaimana mengalokasikan dana tersebut dengan semestinya, yakni untuk

pembangunan dan pemberdayaan sehingga berujung pada meningkatnya jumlah pendapatan dan mencapai tingkat kesejahteraan.

Kartasmita (1996) menyatakan bahwa pemberdayaan masyarakat adalah sebuah konsep pembangunan ekonomi yang merangkum nilai-nilai sosial. Konsep ini menekankan pada pola pemberdayaan masyarakat yang berbasis kultur sosial masyarakat. Untuk menunjang pembangunan desa, pengalokasian dana desa tidak hanya difokuskan pada pembangunan fisik desa saja, tetapi pemberdayaan masyarakat juga harus menjadi fokus utama tidak terkecuali para pekerja perempuan.

Perempuan merupakan sumber daya manusia yang memiliki potensi yang besar yang dapat digunakan dalam berbagai bidang sektor pembangunan nasional. Sejak kemerdekaan Indonesia, perempuan menjadi tumpuan bagi pembangunan bangsa ini. Tidak dapat dipungkiri bahwa kemerdekaan Indonesia tidak terlepas dari peran perempuan sebagai pahlawan pembela tanah air. Hal tersebut membuat banyak ahli sosial menyatakan bahwa perempuan dapat menjadi aktor pembawa kelangsungan pembangunan bangsa. Tenaga wanita yang cakap dan wanita ideal dibutuhkan secara mutlak di era milenial, yaitu wanita yang dapat menjalankan peran rangkapnya (peranan ganda). Perempuan tidak hanya sebatas mengurus rumah tangga, tetapi juga bekerja untuk mendapatkan penghasilan.

Perempuan dengan peran ganda dituntut untuk memiliki ketrampilan tambahan dan ilmu pengetahuan untuk menunjang peranannya, mereka harus mempunyai ketrampilan pada bidang pekerjaan yang ia kerjakan. Oleh karena itu, diperlukan berbagai pelatihan ketrampilan kerja untuk meningkatkan ketrampilan para pekerja terutama pekerja perempuan. Dalam hal ini, desa sebagai ujung tombak pembangunan dan peningkatan kesejahteraan masyarakat harus mampu menjadi sarana untuk mengembangkan ketrampilan masyarakat dengan tujuan akhir adalah peningkatan kesejahteraan masyarakat.

Pada era yang semakin maju ini semakin banyak perempuan yang masuk dalam dunia tenaga kerja baik dalam pemerintahan maupun diluarnya. Tenaga

kerja perempuan adalah seorang perempuan yang mampu melakukan kegiatan/pekerjaan guna menghasilkan barang atau jasa untuk memenuhi kebutuhan sendiri maupun kebutuhan masyarakat. Masuknya wanita dalam dunia tenaga kerja bukan saja didorong oleh kesempatan tenaga kerja yang luas namun juga ada dorongan dari dalam wanita itu sendiri bekerja untuk meningkatkan taraf ekonomi keluarganya dengan pendapatan yang dihasilkan.

Dengan terlibatnya peran wanita dalam proses pembangunan ekonomi desa yang didukung oleh peran pemerintah diharapkan perekonomian desa tersebut dapat tumbuh lebih cepat dan dapat mensejahterakan masyarakatnya

Banda Aceh merupakan salah satu kota yang memiliki luas daerah sebesar 61,36 Kilometer persegi dengan total jumlah Gampong yaitu sebanyak 90 gampong yang tersebar di 9 kecamatan. Berdasarkan data dari pemerintah kota Banda Aceh, jumlah penduduk Banda Aceh saat ini adalah 259.913 jiwa dengan jumlah penduduk laki-laki dan perempuan cukup berimbang dimana jumlah penduduk laki-laki 142.892 dan wanita 134.396.

Jika dibandingkan dengan beberapa kabupaten lain, penerimaan anggaran dana desa Kota Banda Aceh jauh lebih sedikit. Hal ini dikarenakan bahwa jumlah desa yang ada di kabupaten lain lebih banyak daripada di Kota Banda Aceh sesuai dengan luas kabupaten/kota tersebut. Selain itu, masyarakat Kota Banda Aceh pada umumnya hampir rata-rata memiliki pendapatan diatas rata-rata. Kota Banda Aceh sendiri dapat dikategorikan sebagai kota dengan masyarakat kelas menengah dilihat dari jenis pekerjaan masyarakatnya dimana dominannya bekerja sebagai Pegawai Negeri Sipil (PNS) dan Pegawai Swasta, selebihnya berprofesi sebagai pedagang dan lainnya.

No	Nama Desa	Dana Desa TA 2018
1	Aceh Barat	220.833.293
2	Aceh Besar	394.139.267
3	Aceh Selatan	180.346.581
4	Aceh Singkil	90.964.367
5	Aceh Tengah	197.926.546
6	Aceh Tenggara	252.238.604
7	Aceh Timur	345.497.770
8	Aceh Utara	561.531.420
9	Bireun	416.299.734
10	Pidie	497.846.466
11	Simeulu	101.898.806
12	Banda Aceh	64.464.666
13	Sabang	19.664.415
14	Langsa	53.890.468
15	Lhokseumawe	55.247.633
16	Gayo Lues	101.282.860
17	Aceh Barat Daya	105.480.340
18	Aceh Jaya	117.810.988
19	Nagan Raya	158.524.278
20	Aceh Tamiang	149.952.099
21	Bener Meriah	157.018.837
22	Pidie jaya	151.238.912
23	Subulussalam	63.414.600

Sumber : Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan tahun 2018

Tabel 1.2

Rincian Alokasi Dana Desa Menurut Kabupaten di Aceh

Tahun Anggaran 2018

(Dalam Ribuan Rupiah)

Keberhasilan atau kegagalan program ditentukan oleh dua kondisi yang mempengaruhi, yaitu faktor pendukung dan penghambat. Faktor pendukung merupakan kunci jalan atau suksesnya suatu program. Salah satu pendukung kegiatan yang paling umum adalah ketersediaan sarana dan pra sarana. Dengan adanya sarana dan pra sarana yang memadai, suatu program yang ingin dijalankan akan berjalan dengan baik. Ketersediaan dana menjadi salah satu alasan kenapa program yang dicanangkan tidak berjalan sesuai dengan harapan, hal ini menjadi salah satu faktor penghambat suksesnya suatu kegiatan.

Penelitian tentang pemberdayaan masyarakat dari dana desa telah banyak dilakukan Riski(2018) dengan judul penelitiannya “*Efektifitas Pengalokasian Dana Desa Dalam Kesejahteraan Masyarakat Menurut Perspektif Ekonomi Islam (Studi Desa Geuceu Komplek Kecamatan Banda Raya)*”. Penelitiannya menyimpulkan bahwa efek dari pengalokasian dana desa dalam mensejahterakan di desa Geuceu Komplek dikatakan efektif, karena pembangunan yang dibangun memenuhi kebutuhan masyarakat, dan kegiatan pelatihan yang dilaksanakan mendapat respon positif dari masyarakat khususnya ibu-ibu yang berprofesi sebagai IRT, yang dilihat dari minat dalam partisipasi kegiatan tersebut.

Rochmayanti (2015) dengan judul penelitiannya “*Pemberdayaan Perempuan Melalui Alokasi Dana Desa (Studi tentang Peran PKK di Desa Sidodadi Kecamatan Candi Kabupaten Sidoarjo)*”. Penelitiannya menyimpulkan bahwa faktor pendukung yang mendukung pemberdayaan perempuan melalui Alokasi Dana Desa (ADD) di Desa Sidodadi Kecamatan Candi Kabupaten Sidoarjo: Pemerintah Provinsi, Kabupaten dan Desa serta peran PKK di Desa Sidodadi, dan partisipasi masyarakat sehingga membentuk kerjasama yang baik antara pemerintah desa dengan pihak-pihak terkait. Adapun faktor yang menghambat jalannya program pemberdayaan adalah; Dana ADD yang jumlahnya minim setiap tahunnya dari pemerintah serta tingkat kesadaran dan antusiasme masyarakat yang rendah.terutama dalam pengkaderan PKK di Desa sehingga perlu upaya yang lebih memeberdayakan masyarakat agar sadar akan perlunya pemberdayaan.

Oni Nugrianti dan Zulkarnaini (2013) dengan tujuan penelitiannya adalah untuk mengetahui dan menganalisis faktor-faktor yang mempengaruhi pemberdayaan masyarakat desa melalui ADD di Kecamatan Kuantan Tengah Kabupaten Kuantan Singingi. Penelitiannya menyimpulkan bahwa pemberdayaan masyarakat melalui program ADD di Kecamatan Kuantan Tengah Kabupaten Kuantan Singingi masih belum berjalan dengan lancar atau kurang efektif.

Chandra Kusuma, dkk (2012) dengan tujuan penelitian untuk menggambarkan pengelolaan ADD dalam pemberdayaan masyarakat desa serta

faktor-faktor pendorong dan penghambat. Penelitiannya menyimpulkan bahwa bahwa sebagian dari dana ADD untuk pemberdayaan masyarakat digunakan untuk biaya operasional.

Berdasarkan latar belakang dan hasil-hasil penelitian yang telah dilakukan tersebut, dapat dilihat bahwa sangat banyak faktor yang mendorong dan menghambat pemberdayaan perempuan melalui alokasi dana desa. Berdasarkan analisa penulis bahwa ditemukannya faktor-faktor yang berbeda yang dalam berbagai penelitian sehingga penulis ingin melakukan penelitian selanjutnya guna melihat dampak yang dari pengalokasian dana desa terhadap pemberdayaan perempuan di Kota Banda Aceh serta faktor yang mendorong dan menghambatnya. Dengan demikian judul penelitian ini yang disusun adalah **“Dampak Alokasi Dana Desa Terhadap Pemberdayaan Perempuan di Kota Banda Aceh”**

1.2 Rumusan Masalah

1. Bagaimana dampak alokasi dana desa terhadap pemberdayaan perempuan di kota Banda Aceh?
2. Faktor-faktor apa saja yang mendukung jalannya program pemberdayaan perempuan?
3. Faktor-faktor apa saja yang menghambat jalannya program pemberdayaan perempuan?

1.3 Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui bagaimana dampak alokasi dana desa terhadap pemberdayaan perempuan di kota Banda Aceh?
2. Untuk mengetahui faktor-faktor apa saja yang mendukung jalannya program pemberdayaan perempuan?
3. Untuk mengetahui faktor-faktor apa saja yang menghambat jalannya program pemberdayaan perempuan?

1.4 Manfaat Penelitian

1. Dari hasil penelitian agar dapat digunakan sebagai informasi untuk pemerintah dalam pengambilan kebijakan dalam hal pemberdayaan perempuan di Kota Banda Aceh umumnya dan Kecamatan Syiah Kuala khususnya.
2. Hasil penelitian dapat digunakan sebagai bahan rujukan, referensi, dan bahan pustaka untuk penelitian selanjutnya.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Alokasi Dana Desa

Untuk menyelenggarakan otonomi desa dalam melakukan pembangunan dan pemberdayaan desa. Menurut Rozaki (2005) sesungguhnya kebijakan alokasi dana desa yang telah dijalankan memiliki tujuan besar yang kurang lebih sama yaitu merombak ortodoksi pemerintah kabupaten dalam memberikan kewenangan, pelayanan dan bantuan keuangan kepada pemerintahan di level bawahnya (desa). Pola kebijakan pemerintah yang semula sentralis dan dominan, melalui metode alikasi dana desa ini berubah menjadi partisipasif, responsif, dan dijalankan melalui asas desentralisasi.

Prinsip-prinsip dalam mengelola Alokasi Dana Desa adalah partisipatif, bertanggungjawab, terbuka serta memperhatikan kesejahteraan masyarakat desa. Oleh karena diperlukan adanya pengawasan dan evaluasi yang melibatkan seluruh komponen masyarakat desa agar pelaksanaan alokasi dana desa dpat mewujudkan kesejahteraan masyarakat desa.

Menurut Syahbrani (2012) Alokasi Dana Desa adalah bagian keuangan desa yang diperoleh dari bagi hasil Pajak daerah dan bagian dari dana perimbangan keuangan pusat dan daerah yang diterima oleh kabupaten. Tujuan alokasi dana desa adalah:

1. Meningkatkan penyelenggaraan pemerintah desa dalam pelaksanaan pembangunan dan kemasyarakatan sesuai dengan kewenangannya.
2. Meningkatkan kemampuan lembaga kemasyarakatan dalam perencanaan, pelaksanaan, dan pengendalian pembangunan secara partisipasif sesuai dengan potensi desa
3. Meningkatkan pemerataan pendapatan, kesempatan kerja dan kesempatan berusaha bagi masyarakat desa
4. Medorong peningkatan swadaya gotong royong

Adanya alokasi dana desa ini selain memberikan manfaat untuk desa juga memberikan manfaat tersendiri bagi kabupaten/kota antara lain:

1. Kabupaten/Kota dapat menghemat tenaga dengan membiarkan desa mengelola otonominya, tanpa terus bergantung kepada Kabupaten/Kota.
2. Kabupaten/Kota dapat lebih berkonsentrasi meneruskan pembangunan pelayanan publik untuk skala luas yang jauh lebih strategis dan lebih bermanfaat untuk jangka panjang

Alokasi Dana desa merupakan salah satu sumber pendapatan desa yang besarnya telah tertuang dalam peraturan desa anggaran pendapatan dan belanja desa (APBDes). Dalam hal ini kepala desa mempunyai peran sebagai pemegang kekuasaan keuangan desa yang bertanggung jawab atas pengelolaan alokasi dana desa sehingga aktivitas dalam pembiayaan dengan uang alokasi dana desa ini harus direncanakan, dilaksanakan dan dievaluasi secara transparan sesuai ketentuan peraturan yang berlaku. Mengenai pembahasan alokasi dana tersebut, menurut pandangan Sidik (2002) bahwa sebenarnya konsep alokasi dana desa tersebut bermula dari sebuah kritik dan refleksi terhadap model bantuan desa yang diberikan oleh pemerintah pusat bersamaan dengan agenda pembangunan desa sejak tahun 1969.

Dalam hal alokasi dana desa tersebut bahwa secara keseluruhan kebijakan disamping bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa, namun juga bisa mendukung jalannya demokrasi desa dan sekaligus memperkuat otonomi masyarakat dalam pengadaan pemerintahan dan pembangunan desa. Maka dengan kemunculannya tersebut pemerintah desa akhirnya diminta untuk meningkatkan kinerja dalam pelaksanaan pemerintah desa. Memang pada dasarnya kebijakan alokasi dana desa tersebut telah dipogramkan oleh kabupaten atau kota untuk melindungi dan meningkatkan kesejahteraan rakyat desa serta untuk memenuhi hak-hak desa.

2.2 Konsep Pemberdayaan

2.2.1 Pengertian Pemberdayaan

Secara etimologi pemberdayaan berasal dari kata “daya” yang berarti kekuatan atau kemampuan. Berdasarkan pengertian tersebut maka pemberdayaan bisa dimaknai sebagai suatu proses menuju budaya atau proses untuk memperoleh daya kepada pihak yang kurang atau belum berdaya. (Sulistiyani, 2004).

Sementara menurut Priyono, S.Onny dan Pranarka (1996) pemberdayaan adalah proses kepada masyarakat agar menjadi berdaya, mendorong atau memotivasi individu agar mempunyai kemampuan dan keberdayaan untuk menentukan pilihan hidupnya dan pemberdayaan harus ditujukan pada kelompok atau lapisan masyarakat yang tertinggal.

Secara esensial, pemberdayaan menurut Kreisber memiliki dua ciri yaitu pertama, sebagai refleksi kepentingan emansipatoris yang mendorong masyarakat berpartisipasi secara kolektif dalam pembangunan. Kedua, pemberdayaan merupakan proses pelibatan dari individu atau masyarakat dalam proses pencerahan, penyadaran dan pengorganisasian kolektif sehingga mereka dapat berpartisipasi. Pemberdayaan merupakan suatu upaya untuk mengenal, memahami kebijakan dan memanfaatkan kekuatan, menyelidiki proses-proses dimana masyarakat dapat mengatur atau menguasai kehidupan, keterampilan dan kedudukannya menjadi partisipan kritis dan efektif dalam masyarakat, termasuk mengubah kekuatan itu

2.2.2 Tahapan atau Proses Pemberdayaan

Dalam proses pemberdayaan masyarakat diperlukan berbagai upaya-upaya berkelanjutan dalam menjalankan tahapan-tahapan atau proses yang membutuhkan keseriusan dan pengorbanan yang panjang diantaranya harus ada tahap-tahap dalam melaksanakan proses dimana proses akan menghasilkan pemberdayaan bagi masyarakat.

Menurut Randy dan Riant (2007) sebagai proses, pemberdayaan memiliki tiga tahapan diantaranya yaitu penyadaran, pengkapasitasan, dan pendayaan

1. Tahap Penyadaran

Pada tahap ini, sasaran pemberdayaan yang akan diberdayakan terlebih dahulu diberi pencerahan dalam bentuk penyadaran bahwa mereka mempunyai hak untuk memiliki sesuatu. Apabila yang menjadi sasaran pemberdayaan tersebut ialah para kelompok miskin, maka kepada mereka diberikan pemahaman bahwa mereka bisa menjadi kaum menengah keatas bila mereka memiliki kapasitas untuk keluar dari keskinannya. Tahap penyadaran ini bisa dilaksanakan dengan memberikan bersifat kognisi, *belief* dan *healing*. Dengan demikian sasaran memahami bahwa mereka butuh diberdayakan dan proses pemberdayaan dimulai dari dalam diri mereka.

2. Tahap Pengkapasitasan

Pada tahap ini, pengkapasitasan (*capacity building*) bisa juga disebut sebagai memampukan atau *enabling*. Sasaran pemberdayaan dituntut harus mampu lebih dulu sebelum yang diberi sangkutan diberi daya atau kuasa. Jadi, pada prinsipnya sasaran diberikan lebih dahulu program perempuan untuk membuat sasaran mempunyai keahlian atau ketrampilan (*skillfull*) agar mampu dalam mengelola sesuatu yang akan menjadi sasarannya dalam menerima daya atau kuasa. Proses memampukan sasaran sendiri terdiri dari tiga jenis, yaitu: workshop, seminar, simulasi, dan lainnya. Pada hakekatnya adalah memberikan kapasitas kepada individu dan kelompok manusia supaya mampu menerima daya atau kekuasaan yang akan diberikan.

3. Tahap Pendayaan

Pada tahap pendayaan, hal yang dilakukan dengan cara pemberian daya, kekuasaan, otoritas, serta peluang atau kesempatan kepada sasaran. Pemberian ini harus disesuaikan dengan kualitas kecakapan yang telah dimiliki sasaran.

Berdasarkan penelitian kepustakaan bahwa proses pemberdayaan mengandung dua kecenderungan, pertama adalah kecenderungan primer dari makna pemberdayaan yang merupakan suatu proses pemberdayaan yang memfokuskan pada proses memberikan atau mengalihkan sebagian kekuasaan, kekuatan atau kemampuan individu menjadi lebih berdaya. Proses ini bisa dilengkapi pula dengan berbagai upaya yaitu membangun asset material yang berguna mendukung pembangunan kemandirian mereka melalui organisasi. Kecenderungan kedua adalah kecenderungan sekunder yang menitikberatkan pada proses menstimulasi, mendorong atau memotivasi individu agar mempunyai kemampuan atau keberdayaan untuk menentukan pilihan hidupnya melalui proses berdialog.

Pemberdayaan masyarakat memiliki 7 tahapan atau langkah yang dilakukan yaitu sebagai berikut (Soekanto, 1987) :

1. Tahapan Persiapan.

Pada tahap ini ada 2 tahap yang harus dikerjakan, yaitu: pertama penyimpanan petugas yaitu tenaga pemberdayaa masyarakat dan kedua penyiapan lapangan yang pada dasarnya diusahakan dilakukan secara non-direktif

2. Tahapan Pengkajian

Pada tahap ini yaitu proses pengkajian dapat dilakukan secara individual melalui kelompok-kelompok dalam masyarakat.

3. Tahapan perencanaan alternatif program atau kegiatan

Pada tahap ini petugas mencoba melibatkan warga untuk berfikir tentang masalah yang mereka hadapi dan bagaimana cara mengatasinya.

4. Tahap pemformalisasi rencana aksi

Pada tahapan ini petugas membantu masing-masing kelompok untuk merumuskan dan menentukan program dan kegiatan apa yang akan mereka lakukan untuk mengatasi permasalahan yang ada. Disamping itu, petugas juga ikut membantu untuk memformalisasikan gagasan mereka kedalam bentuk tertulis.

5. Tahap pelaksanaan program atau kegiatan

Dalam upaya pelaksanaan program pemberdayaan masyarakat, peran masyarakat sebagai kader diharapkan dapat menjaga keberlangsungan program yang telah dikembangkan. Kerjasama antara petugas dan masyarakat merupakan hal penting dalam tahapan ini karena terkadang sesuatu yang sudah direncanakan dengan baik melenceng saat di lapangan

6. Tahap evaluasi

Evaluasi sebagai proses pengawasan program pemberdayaan masyarakat sebaiknya melibatkan warga. Dengan keterlibatan warga tersebut diharapkan dalam jangka waktu pendek biasanya membentuk suatu sistem komunitas untuk pengawasan secara internal dan untuk jangka waktu panjang dapat membangun komunikasi masyarakat dengan memanfaatkan sumber daya yang ada.

7. Tahap terminasi

Tahap terminasi merupakan tahapan pemutusan hubungan secara formal dengan komunitas sasaran. Dalam tahap ini diharapkan proyek harus segera berhenti

2.2.3 Indikator Keberdayaan

Untuk melihat apakah pemberdayaan masyarakat berjalan baik atau tidak tinggal membandingkan kriteria normatif dengan kenyataan yang ada. Jika kesenjangan kecil pemberdayaan masyarakat relatif berhasil, sebaliknya apabila kesenjangan besar maka pemberdayaan masyarakat tidak berjalan. Proses pemberdayaan warga masyarakat diharapkan dapat menjadikan masyarakat menjadi lebih berdaya, berkekuatan, dan berkemampuan. Kaitannya dengan indikator masyarakat berdaya, Sumardjo (1999) menyebutkan beberapa ciri warga masyarakat berdaya yaitu:

1. Mampu memahami diri dan potensinya, mampu merencanakan (mengantisipasi kondisi perubahan kedepan)
2. Mampu mengarahkan dirinya sendiri

3. Memiliki kekuatan untuk berunding
4. Memiliki bargaining power yang memadai dalam melakukan kerja sama yang saling menguntungkan
5. Bertanggungjawab atas tindakannya

Slamet (2003) menjelaskan lebih rinci bahwa yang dimaksud dengan masyarakat berdaya adalah masyarakat yang tau, mengerti, paham termotivasi, berkesempatan, memanfaatkan peluang, berenergi, mampu bekerja sama, tahu berbagai alternatif, mampu mengambil keputusan, berani megambil resiko, mampu mencari dan menangkap informasi dan mampu bertindak sesuai dengan situasi.

Menurut pendapat Schuler, Hashemi dan Riley mengembangkan beberapa indikator pemberdayaan yang mereka sebut sebagai *empowerment index* atau indeks pemberdayaan diantaranya ialah:

1. Kebebasan mobilitas, merupakan suatu kemampuan individu untuk pergi ke luar rumah atau wilayah tempat tinggalnya, seperti ke pasar, rumah ibadah dan rumah tetangga. Dalam hal ini tingkat mobilitas ini dianggap tinggi apabila individu mampu pergi sendirian.
2. Kemampuan membeli komoditas kecil yaitu kemampuan individu untuk membeli barang-barang kebutuhan keluarga sehari-hari seperti beras. Minyak tanah, minyak goreng, bumbu dan kebutuhan dirinya seperti sabun mandi, bedak, sampo. Dalam hal ini individu dianggap mampu melakukan kegiatan tersebut, terutama apabila mereka bisa membuat keputusan sendiri tanpa meminta ijin pasangannya dan terlebih apabila mereka dapat membeli barang-barang tersebut dengan menggunakan uangnya sendiri.
3. Kemampuan membeli komoditas besar ialah suatu kemampuan individu untuk membeli barang-barang sekunder atau tersier, seperti lemari pakaian, TV, radio, koran, majalah, pakaian keluarga. Seperti halnya indikator di atas, apabila indikator di atas poin tinggi diberikan terhadap individu yang dapat membuat keputusan sendiri tanpa meminta ijin

pasangannya dan terlebih apabila mereka dapat membeli barang-barang tersebut dengan menggunakan uangnya sendiri.

4. Terlibat dalam pembuatan keputusan-keputusan rumah tangga yaitu mampu membuat keputusan secara sendiri maupun bersama suami/istri mengenai keputusan-keputusan keluarga, contohnya mengenai renovasi rumah, pembelian kambing untuk ditenak, memperoleh kredit usaha.
5. Kebebasan relatif dari dominasi keluarga yaitu informan ditanya mengenai apakah dalam satu tahun terakhir ada seseorang (suami, istri, anak-anak, mertua) yang mengambil uang, tanah, perhiasan, dari mereka tanpa ijinnya yang melarang mempunyai anak atau melarang bekerja di luar rumah
6. Kesadaran hukum dan politik yaitu mengetahui nama salah seorang pegawai pemerintah desa/kelurahan diantaranya seorang DPRD setempat, nama presiden, mengetahui pentingnya memiliki surat nikah dan hukum-hukum waris.
7. Keterlibatan dalam kampanye dan protes-protes yakni seseorang dianggap berdaya jika mereka pernah terlibat dalam kampanye atau bersama orang lain melakukan protes, misalnya, terhadap suami yang memukul istri, istri yang mengabaikan suami dan keluarganya, gaji yang tidak adil dan penyalahgunaan kekuasaan polisi dan pegawai pemerintah.
8. Jaminan ekonomi dan kontribusi terhadap keluarga yaitu memiliki rumah, tanah, aset produktif, tabungan. Seseorang dianggap memiliki poin tinggi apabila mereka memiliki aspek-aspek tersebut secara sendiri atau terpisah dari pasangannya.

2.3 Pemberdayaan Perempuan

Berdasarkan pendapat Karl (1995) mengemukakan bahwa pemberdayaan perempuan sebagai suatu proses kesadaran dan pembentukan kapasitas (*capacity building*) terhadap partisipasi yang lebih besar, kekuasaan dan pengawasan pembentukan keputusan yang lebih besar antara perempuan dan laki-laki.

Menurut argumen Moser (1997), inti dari strategi pemberdayaan (*empowerment*) sebenarnya bukan bertujuan menciptakan perempuan yang lebih unggul dari pada laki-laki, namun pendekatan pemberdayaan ini kendati menyadari pentingnya kekuasaan perempuan, tetapi pendekatan tersebut lebih berupaya untuk mengidentifikasi pada kekuasaan perempuan bukan sekedar dalam kerangka dominasi yang lain, melainkan lebih dalam kerangka kapasitas perempuan untuk meningkatkan kemandirian dan kekuatan internal. Memang dalam upaya memberdayakan perempuan yang diperjuangkan adalah dipenuhinya hak perempuan untuk menentukan pilihan dalam kehidupan dan untuk mempengaruhi arah perubahan melalui kesanggupan untuk melakukan kontrol atas sumber daya material dan non material yang penting. Dalam pendekatan pemberdayaan ini tidak menekankan pentingnya peningkatan status perempuan secara relatif terhadap kaum lelaki, namun berupaya memberikan kekuasaan pada perempuan melalui pendistribusian kembali kekuasaan di dalam dan di antara masyarakat.

Profesor Gunawan Sumodiningrat yang dikutip Riant Nugroho (2008) menjelaskan untuk melakukan pemberdayaan perlu 3 langkah yang berkesinambungan:

1. Pemihakan, artinya perempuan sebagai pihak yang diberdayakan harus dipihaki daripada laki-laki
2. Penyiapan, artinya pemberdayaan menuntut kemampuan perempuan untuk bisa ikut mengakses, berpartisipasi, mengontrol, dan mengambil manfaat
3. Perlindungan, artinya memberikan proteksi sampai dapat dilepas.

Menurut Agustin Satyawati pemberdayan perempuan seharusnya tidak dimaksudkan untuk memaksa perempuan seharusnya tidak dimaksudkan untuk memaksa perempuan dengan laki-laki dalam sektor publik untuk mencapai posisi yang sejajar, tetapi seharusnya di lakukan untuk mendorong perempuan (dan juga laki-laki) menciptakan kerja sama dan sinergi antara perempuan dan laki-laki menciptakan kerja sama dan sinergi antara perempuan dan laki-laki baik dalam

sektor domestik maupun masyarakat yang aman dan nyaman. Pemberdayaan perempuan sebagai mitra sejajar laki-laki adalah kondisi dimana laki-laki dan perempuan memiliki kesamaan hak dan kewajiban yang terwujud dalam kesempatan, kedudukan, peranan yang dilandasi sikap dan perilaku saling membantu dan mengisi di semua bidang kehidupan. Dalam proses pemberdayaan ini perlu diperhatikan bahwa perempuan tidak bermaksud mendominasi atau merebut kekuasaan dan menggunakannya dengan cara eksploitasi dan over-aktif, tetapi dalam arti pengembangan diri cara-cara demokratis dalam membagi kekuasaan atas dasar kebersamaan kesetaraan dan tanggung rasa (*sharing power on a mutual and equal basis*).

Teori feminisme Rosemerie bahwa ingin mengangkat harkat dan martabat perempuan sebagai manusia yang mempunyai tujuan akhir bagi perempuan untuk menjadi mandiri dengan cara menciptakan yang baru bagi perempuan, serta mereformasi yang tidak lurus bagi perempuan.

Menurut Binar (1999) dalam pemberdayaan perempuan sektor informal bisa dianalisis dengan 5 (lima) dimensi diantaranya ialah

1. Dimensi kesejahteraan, yaitu secara sederhana variabel tersebut bisa diukur dengan mengetahui terpenuhi atau tidaknya kebutuhan dasar, seperti kebutuhan makanan, kesehatan, perumahan dan sebagainya. Sejauh mana kebutuhan tersebut dapat dinikmati dan tidak saja dinikmati oleh laki-laki tetapi juga oleh kaum perempuan.
2. Dimensi akses atas sumber daya merupakan variabel tersebut dipeketahui, dan mengukur akses terhadap modal, produksi, informasi, keterampilan dan lainnya. Adanya kesenjangan dalam mendapatkan akses terhadap sumber daya antara laki-laki dengan perempuan akan mengakibatkan terjadinya perbedaan produktifitas diantara mereka.
3. Dimensi penyadaran atau kesadaran kritis merupakan variabel tersebut diperlukan untuk mengetahui ada tidaknya upaya penyadaran terhadap adanya kesenjangan gender yang disebabkan faktor sosial budaya yang

sifatnya dapat dirubah. Kesenjangan tersebut terjadi adanya anggapan bahwa posisi sosial ekonomi perempuan lebih rendah dari pada laki-laki.

4. Dimensi partisipasi merupakan sebuah variabel untuk mengetahui ada tidaknya kesenjangan gender dalam partisipasi yang ditunjukkan oleh terwakili atau tidak tenaga kerja perempuan dalam wadah atau lembagalembaga yang terkesan elit. Upaya pemberdayaan diarahkan pada kegiatan pengorganisasian perempuan sehingga bisa berperan dalam proses pengambilan keputusan dan kepentingan mereka juga dapat terwakili.
5. Dimensi kontrol merupakan variabel ini mengetahui ada atau tidaknya kesenjangan antara laki-laki dengan perempuan terhadap alokasi kekuasaan pada segala bidang kegiatan.

Selanjutnya menurut Ife (1997) untuk tujuan pemberdayaan perempuan itu sendiri adalah

1. Meningkatkan keterjangkauan (akses) perempuan kepada sumber dan manfaat pembangunan (modal, tanah, pelayanan sosial, pendidikan, kesehatan, pekerjaan, dan informasi)
2. Meningkatkan kesadaran perempuan mengenai diskriminasi gender, bahwa situasi perempuan dan perlakuan diskriminatif yang mereka terima bukanlah disebabkan oleh takdir ataupun karena kekurangan pada diri mereka sendiri, tetapi karena system sosial yang mendeskripsikan mereka.
3. Meningkatkan partisipasi aktif mereka dalam pengambilan keputusan dalam keluarga masyarakat.
4. Meningkatkan penguasaan perempuan terhadap sumber dan manfaat pembangunan
5. Pembangunan perempuan bertujuan menjadikan perempuan mandiri dalam arti ekonomi, sosial budaya dan secara psikologi, program-program pembangunan disamping memenuhi kebutuhan gender praktis perempuan juga harus dapat memenuhi kebutuhan strategis.

2.3.1 Program Pemberdayaan Perempuan di Bidang Ekonomi

Dalam hal peningkatan ekonomi perempuan di Indonesia khususnya di daerah pedesaan, perempuan memiliki keterbatasan dalam menjalankan aktivitasnya, keterbatasan tersebut seperti rendahnya pendidikan, keterampilan, sedikitnya kesempatan kerja, dan juga hambatan ideologis perempuan yang terkait rumah tangga. Hal tersebut menyebabkan kesempatan perempuan untuk memanfaatkan peluang ekonomi yang ada menjadi sangat terbatas.

Oleh karena itu program pemberdayaan bagi perempuan di bidang ekonomi sangat diperlukan karena pada dasarnya perempuan memiliki potensi yang luar biasa dalam perekonomian terutama dalam pengaturan ekonomi rumah tangga.

Menurut Riant Nugroho (2008), tujuan dari program pemberdayaan perempuan ialah :

1. Meningkatkan kemampuan kaum perempuan untuk melibatkan diri dalam program pembangunan, sebagai partisipasi aktif (subjek) agar tidak sekedar menjadi objek pembangunan seperti yang terjadi selama ini,
2. Meningkatkan kemampuan kaum perempuan dalam kepemimpinan, untuk meningkatkan posisi tawar-menawar dan keterlibatan dalam setiap pembangunan baik sebagai perencana, pelaksana, maupun melakukan monitoring dan evaluasi kegiatan,
3. Meningkatkan kemampuan kaum perempuan dalam mengelola usaha skala rumah tangga, industri kecil maupun industri besar untuk menunjang peningkatan kebutuhan rumah tangga, maupun untuk membuka peluang kerja produktif dan mandiri,
4. Meningkatkan peran dan fungsi organisasi perempuan di tingkat lokal sebagai wadah pemberdayaan kaum perempuan agar dapat terlibat secara aktif dalam program pembangunan pada wilayah tempat tinggalnya.

Di bidang ekonomi, pemberdayaan perempuan lebih banyak ditekankan untuk meningkatkan kemampuan dalam mengelola usaha, khususnya dalam hal ini adalah usaha *home industry*. Ada lima langkah penting yang perlu diperhatikan

dalam upaya pengembangan kemampuan berwirausaha bagi perempuan. Menurut IMF yang dikutip oleh Herri, dkk (2009: 5) yaitu :

1. Membantu dan mendorong kaum perempuan untuk membangun dan mengembangkan pengetahuan serta kompetensi diri mereka, melalui berbagai program pelatihan
2. Membantu kaum perempuan dalam strategi usaha dan pemasaran produk
3. Memberikan pemahaman terhadap regulasi dan peraturan pemerintah terkait dengan legalitas dunia usaha
4. Mendorong dan membantu kaum perempuan untuk mampu menggunakan teknologi informasi dan komunikasi secara optimal
5. Membuat Usaha Mikro/Jaringan Usaha Mikro Perempuan/ Forum Pelatihan Usaha.

Adapun program-program pemberdayaan perempuan yang ditawarkan menurut Riant Nugroho (2008) adalah :

1. Penguatan organisasi kelompok perempuan di segala tingkat mulai dari kampung hingga nasional. Seperti misalnya PKK (Pembinaan Kesejahteraan Keluarga), perkumpulan koperasi maupun yayasan sosial. Penguatan kelembagaan ditujukan untuk meningkatkan kemampuan lembaga agar dapat berperan aktif sebagai perencana, pelaksana, maupun pengontrol,
2. Peningkatan fungsi dan peran organisasi perempuan dalam pemasaran sosial program-program pemberdayaan. Hal ini penting mengingat selama ini program pemberdayaan yang ada, kurang disosialisasikan dan kurang melibatkan peran masyarakat,
3. Pelibatan kelompok perempuan dalam perencanaan, pelaksanaan dan monitoring semua program pembangunan yang ada. Keterlibatan perempuan meliputi program pembangunan fisik, penguatan ekonomi, dan peningkatan kualitas sumber daya manusia,
4. Peningkatan kemampuan kepemimpinan perempuan, agar mempunyai posisi tawar yang setara serta memiliki akses dan peluang untuk terlibat dalam pembangunan,

5. Peningkatan kemampuan anggota kelompok perempuan dalam bidang usaha (skala industri kecil/rumah tangga hingga skala industri besar) dengan berbagai keterampilan yang menunjang seperti kemampuan produksi, kemampuan manajemen usaha serta kemampuan untuk mengakses kredit dan pemasaran yang lebih luas

2.4 Penelitian Terdahulu

Penelitian mengenai alokasi dana desa bukan sebuah penelitian yang baru, banyak peneliti-peneliti terdahulu yang telah meneliti, pengaruh, peranan, dan menganalisis mengenai dampak pengalokasian dana desa terhadap pemberdayaan masyarakat khususnya perempuan. Penelitian- penelitian tersebut antara lain, sebagai berikut:

No	Peneliti dan Tahun	Tujuan	Jenis penelitian	Kesimpulan
1	Riski ulfa Nazilla (2018)	Untuk mengetahui efek alokasi dana desa terhadap peningkatan kesejahteraan masyarakat di desa Geuceu Komplek	Penelitian deskriptif dengan pendekatan kualitatif	efektif, karena pembangunan yang dibangun memenuhi kebutuhan masyarakat, dan kegiatan pelatihan yang dilaksanakan mendapat respon positif dari masyarakat
2	Rochmayanti (2015)	untuk mengetahui Peran PKK terhadap Pemberdayaan Perempuan Melalui Alokasi Dana Desa	penelitian kualitatif deskriptif	perlu upaya yang lebih mememberdayakan masyarakat agar sadar akan perlunya pemberdayaan
3	Oni Nugrianti dan Zulkarnaini (2013)	Untuk mengetahui dan menganalisis faktor-faktor yang mempengaruhi pemberdayaan	Penelitian deskriptif kualitatif	Dalam penelitiannya menyimpulkan bahwa Pemberdayaan

		masyarakat desa melalui ADD di Kecamatan KuantanTengah Kabupaten Kuantan Singingi		masyarakat melalui program ADD di Kecamatan Kuantan Tengah Kabupaten Kuantan Singingi masih belum berjalan dengan lancar atau kurang efektif.
4	Chandra Kusuma, dkk (2012).	Untuk menggambarkan pengelolaan ADD dalam pemberdayaan masyarakat desa serta faktor-faktor pendorong dan penghambat	Penelitian deskriptif kualitatif	sebagian dari dana ADD untuk pemberdayaan masyarakat digunakan untuk biaya operasional

Penelitian sebelumnya mempunyai beberapa keterkaitan dengan apa yang ingin penulis teliti mulai dari tujuan, serta variabel yang digunakan dalam penelitian.

BAB III METODOLOGI PENELITIAN

3.1 Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang akan dilakukan adalah penelitian deskriptif dengan pendekatan kualitatif yang bertujuan untuk memberikan gambaran atau penjelasan mengenai dampak alokasi dana desa (ADD) terhadap pemberdayaan perempuan di Kecamatan Syiah Kuala.

Berdasarkan rumusan masalah, penelitian ini menggunakan rumusan masalah deskriptif yaitu suatu rumusan masalah yang memandu peneliti untuk mengeksplorasi dan atau memotret situasi sosial yang akan diteliti secara menyeluruh, luas dan mendalam (Sugiyono, 2009).

3.2 Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilakukan di Kecamatan Syiah Kuala. Hal ini didasari oleh informasi dari staf kantor camat Syiah Kuala bahwa gampong di kecamatan Syiah Kuala menerapkan program pemberdayaan perempuan.

3.3 Waktu Penelitian

Penelitian ini dilakukan pada tanggal 16 Oktober sampai dengan 02 November 2019 di 10 desa yang ada pada Kecamatan syiah Kuala.

3.4 Objek Penelitian

Objek dalam penelitian ini adalah aparatur desa dan penduduk perempuan yang menerima manfaat dari dana desa yang ada di kecamatan Syiah Kuala. Penentuan sampel dalam penelitian ini menggunakan teknik snowball sampling yaitu teknik pengambilan sampel dimana sampel diperoleh melalui proses bergulir dari satu informan ke informan yang lain. (Sugiyono, 2009)

3.5 Jenis dan Sumber Data

Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer dan data sekunder. Data primer adalah data yang berasal dari sumber asli atau pertama, data ini tidak tersedia dalam bentuk terkompilasi ataupun dalam bentuk file-file. Data ini harus dicari melalui narasumber atau dalam istilah teknisnya responden, yaitu orang yang kita jadikan objek penelitian atau orang yang kita jadikan sebagai sarana mendapatkan informasi ataupun data. Data sekunder adalah data yang mengacu pada informasi yang dikumpulkan dari sumber yang telah ada.

3.6 Teknik Pengumpulan Data

1. Pengamatan (observasi)

Observasi merupakan salah satu metode untuk menyimpulkan data, dalam hal ini penulis melakukan pengamatan secara langsung terhadap obyek penelitian untuk menarik kesimpulan. Peneliti mencoba memahami dan menganalisis berbagai gejala yang berkaitan dengan objek penelitian, yaitu pemberdayaan perempuan melalui alokasi dana desa di Banda Aceh. Beberapa hal yang terkait dengan pengalokasian dana desa peneliti amati langsung.

2. Wawancara (*interview*)

Wawancara adalah percakapan antara dua orang yang salah satunya bertujuan untuk menggali dan mendapatkan informasi untuk suatu tujuan tertentu (Sugiyono, 2009). Penelitian ini mewawancarai aparatur gampong dan masyarakat perempuan yang menerima manfaat dari dana desa.

3.7 Definisi Operasional Variabel

Definisi operasional variabel yang digunakan dalam penelitian ini adalah:

1. Alokasi dana desa adalah bagian keuangan desa yang diperoleh dari bagi hasil Pajak daerah dan bagian dari dana perimbangan keuangan pusat dan daerah yang diterima oleh kabupaten
2. Pemberdayaan perempuan adalah suatu proses kesadaran dan pembentukan kapasitas terhadap partisipasi yang lebih besar, kekuasaan dan pengawasan pembentukan keputusan yang lebih besar antara perempuan dan laki-laki.

BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN

4.1 Gambaran Umum Kecamatan Syiah Kuala

4.1.1 Luas Desa Kecamatan Syiah Kuala

Kecamatan Syiah Kuala terdiri atas 3 kemukiman, 10 desa, dan 41 dusun. Dengan jumlah gampong yang banyak, tentu dibarengi juga dengan wilayah yang luas. Dari 10 desa yang ada di kecamatan Syiah Kuala, Alue Naga merupakan desa dengan wilayah desa yang terluas yaitu mencapai 242,6 Ha.

Desa	Luas Gampong(Ha)
Ie Masen Kayee Adang	70,2
Pineung	61,5
Langugob	153,2
Kopelma Darussalam	206,2
Rukoh	95,2
Jeulingke	154,4
Tibang	230,7
Deah Raya	178,2
Alue Naga	242,6
Peurada	31,79

Sumber: Kecamatan Syiah Kuala Dalam Angka Tahun 2018

Tabel 4.1

Data luas desa kecamatan Syiah Kuala Tahun 2017

4.1.2 Batas-Batas Desa Kecamatan Syiah Kuala

Batas desa adalah pembatas wilayah administrasi pemerintahan antar desa yang merupakan rangkaian titik-titik koordinat yang berada pada permukaan bumi dapat berupa tanda-tanda alam seperti pegunungan, median sungai dan/atau unsur buatan dilapangan yang dituangkan dalam bentuk peta.

Penetapan dan penegasan batas wilayah sebuah desa harus menjadi prioritas pemerintah karena jika batas wilayah tidak jelas, selain bisa menghambat proses pembangunan di desa dan berpotensi terjadinya komplik antar warga.

Tujuan penetapan dan penegasan batas desa untuk menciptakan tertib administrasi pemerintahan, memberikan kejelasan dan kepastian hukum terhadap batas wilayah suatu desa yang memenuhi aspek teknis dan yuridis.

Gampong	Batas
Ie Masen Kayee Adang	Utara : Gampong Pineung Timur : Kabupaten Aceh Besar Selatan : Gampong Doy Barat : Gampong Lambhuk
Pineung	Utara: Gampong Peurada Timur : Gampong Lamgugob Selatan : Gampong Ie Masen Kayee Adang Barat : Gampong Kota Baru Kec. Kuta Alam
Lamgugob	Utara : Gampong Jeulingke Timur : Gampong Rukoh Selatan : Gampong Ie Masen Kayee Adang Barat : Gampong Pineung
Kopelma Darussalam	Utara : Gampong Rukoh Timur : Kabupaten Aceh Besar Selatan : Kabupaten Aceh Besar Barat : Kabupaten Aceh Besar
Rukoh	Utara : Kabupaten Aceh Besar Timur : Kabupaten Aceh Besar Selatan : Gampong Kopelma Darussalam Barat : Gampong Lamgugob
Jeulingke	Utara : Gampong Tibang Timur : Kabupaten Aceh Besar Selatan : Gampong Peurada Barat : Gampong Bandar Baru Kec.Kuta Alam
Tibang	Utara : Gampong Alue Naga Timur : Kabupaten Aceh Besar \
Deah Raya	Utara : Selat Malaka Timur : Gampong Alue Naga Selatan : Gampong Lambaro Skep Kec. Kuta Alam Barat : Gampong Lampulo Kec. Kuta Alam
Alue Naga	Utara : Selat Malaka Timur : Kabupaten Aceh Besar Selatan : Gampong Tibang Barat : Gampong Deah Raya
Peurada	Utara : Gampong Jeulingke Timur : Gampong Lamgugob Selatan : Gampong Pineung

	Barat : Gampong Kota Baru Kec. Kuta Alam
--	--

Sumber: Kecamatan Syiah Kuala Dalam Angka Tahun 2018

Tabel 4.2

**Batas-Batas Desa Dalam Kecamatan Syiah Kuala
Tahun 2017**

4.1.3 Jumlah Penduduk Kecamatan Syiah Kuala

Penduduk adalah semua orang yang berdomisili di wilayah geografis Republik Indonesia selama 6 bulan atau lebih dan atau mereka yang berdomisili kurang dari 6 bulan tetapi bertujuan untuk menetap.

Penduduk terbanyak di kecamatan Syiah Kuala terdapat di desa Jeulingke yaitu mencapai 6567 jiwa dengan penduduk laki-laki sebanyak 3448 jiwa dan penduduk perempuan sebanyak 3119 jiwa. Deah Raya merupakan desa dengan penduduk paling sedikit di kecamatan Syiah Kuala yaitu sebanyak 1023 jiwa. Jika dibandingkan dengan penduduk Jeulingke, jumlah penduduk Deah Raya tidak mencapai setengah dari penduduk perempuan desa Jeulingke.

Desa	laki-laki	perempuan	Total
Ie Masen Kayee Adang	3347	2178	4415
Pineung	2228	2161	4389
Lamugob	2290	2113	4403
Kopelma Darussalam	2149	2579	4728
Rukoh	2704	2479	5183
Jeulingke	3448	4119	6567
Tibang	811	704	1515
Deah Raya	551	472	1023
Alue Naga	896	732	1629
Peurada	1652	1690	3342

Sumber: Kecamatan Syiah Kuala Dalam Angka Tahun 2018

Tabel 4.3

**Data Jumlah Penduduk kecamatan Syiah Kuala
Tahun 2017**

4.1.4 Visi Misi Kecamatan Syiah Kuala

Adapun visi Kecamatan Syiah Kuala adalah “Mewujudkan penyelenggaraan kegiatan Kecamatan Syiah Kuala yang madani melalui pembenahan ekonomi gampong dan kualitas pelayanan administrasi pemerintah”

Misi dari Kecamatan Syiah Kuala adalah sebagai berikut:

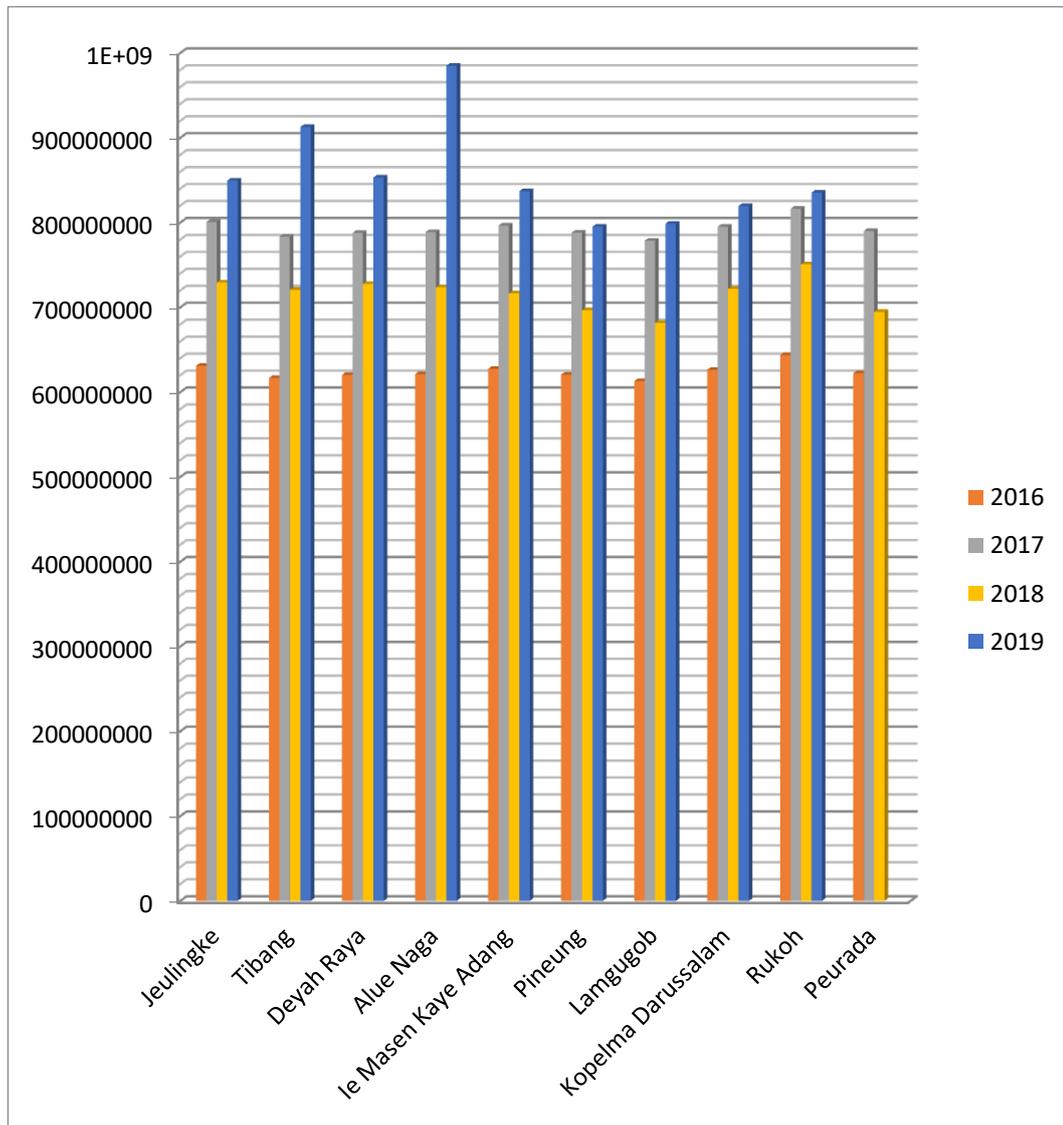
1. Memberikan pelayanan administrasi pemerintah terpadu melalui profesionalitas aparatur kecamatan.
2. Mengoptimalkan peran serta masyarakat dalam pembenahan pembangunan dan pemberdayaan ekonomi melalui pembinaan dan sosialisasi potensi kecamatan disegala bidang.

4.2 Penerimaan Dana Desa Kecamatan Syiah Kuala

Sejak diberikan dana desa pada tahun 2015-2019, terdapat perbedaan jumlah desa yang tersebar sebagai penerima dana desa. Dana desa sendiri digubakan untuk membangun gampong baik untuk pembangunan fisik gampong maupun untuk pemberdayaan masyarakat gampong. Dana desa yang diberikan dalam jumlah besar diharapkan mampu dikelola dengan baik guna tercapainya tujuan dari pemberian dana desa itu sendiri.

Syiah Kuala merupakan salah kecamatan di Kota Banda Aceh yang semua desa nya mendapat jatah dana desa dari pemerintah pusat. Jumlah dana desa yang diterima di kecamatan Syiah juga bervariasi. Hal ini tergantung dari tingkat kebutuhan desa juga jumlah penerimaannya dipengaruhi oleh bsarnya jumlah penggunaan tahun sebelumnya. Jika pada tahun sebelumnya dana desa yang diberikan tidak habis digunakan (silpa) maka untuk tahun deoannya jumlah dana desa yang diterima desa tersebut akan dipotong.

Dana desa paling besar adalah desa Alue Naga yaitu senilai Rp984.910.447. hal ini dikarenakan desa Alue Naga masih sangat tertinggal pembangunan desanya dibandingkan dengan desa lain yang ada di kecamatan Syiah Kuala. Ini dapat kita lihat dari kondisi desa yang masih sangat membutuhkan pembangunan fisik.



Sumber: BPKK Banda Aceh Tahun 2019

Gambar 4.1

Jumlah Penerimaan Dana Desa Kecamatan Syiah Kuala

Tahun 2015-2019

4.3 Penggunaan Dana Desa di Kecamatan Syiah Kuala

Pada umumnya, penggunaan dana desa diprioritaskan untuk membiayai pembangunan dan pemberdaan masyarakat yang ditujukan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa, peningkatan kualitas hidup manusia serta penanggulangan kemiskinan dan dituangkan dalam rencana kerja pemerintah

desa. Pelaksanaan kegiatan yang didanai dari dana desa berpedoman pada pedoman teknis yang ditetapkan oleh bupati/walikota mengenai kegiatan yang dibiayai dari dana desa.

Pelaksanaan kegiatan yang didanai dari dana desa dilakukan secara swakelola dengan menggunakan sumber daya atau bahan baku lokal, dan diupayakan lebih banyak menyerap tenaga kerja dari masyarakat desa setempat. Penggunaan dana desa di kecamatan Syiah Kuala umumnya digunakan untuk kegiatan pembangunan, pemberdayaan masyarakat gampong, penyelenggaraan pemerintah desa, dan pembinaan masyarakat. Disamping itu juga ada hal-hal lain yang menjadi kepentingan dalam penggunaan dana desa

Desa	Prioritas penggunaan
Ie Masen Kayee Adang	<ol style="list-style-type: none"> 1. Penyelenggaraan pemerintahan desa 2. Pelaksanaan pembangunan desa 3. Pembinaan kemasyarakatan 4. Pemberdayaan masyarakat
Pineung	<ol style="list-style-type: none"> 1. Penyelenggaraan pemerintahan desa 2. Pelaksanaan pembangunan desa 3. Pembinaan kemasyarakatan 4. Pemberdayaan masyarakat
Lamgugob	<ol style="list-style-type: none"> 1. Penyelenggaraan pemerintahan desa 2. Pelaksanaan pembangunan desa 3. Pembinaan kemasyarakatan 4. Pemberdayaan masyarakat
Kopelma Darussalam	<ol style="list-style-type: none"> 1. Penyelenggaraan pemerintahan desa 2. Pelaksanaan pembangunan desa 3. Pembinaan kemasyarakatan 4. Pemberdayaan masyarakat
Rukoh	<ol style="list-style-type: none"> 1. Penyelenggaraan pemerintahan desa 2. Pelaksanaan pembangunan desa 3. Pembinaan kemasyarakatan 4. Pemberdayaan masyarakat
Jeulingke	<ol style="list-style-type: none"> 1. Penyelenggaraan pemerintahan desa 2. Pelaksanaan pembangunan desa 3. Pembinaan kemasyarakatan 4. Pemberdayaan masyarakat
Tibang	<ol style="list-style-type: none"> 1. Penyelenggaraan pemerintahan desa 2. Pelaksanaan pembangunan desa 3. Pembinaan kemasyarakatan 4. Pemberdayaan masyarakat
Deah Raya	<ol style="list-style-type: none"> 1. Penyelenggaraan pemerintahan desa 2. Pelaksanaan pembangunan desa

	<ol style="list-style-type: none"> 3. Pembinaan kemasyarakatan 4. Pemberdayaan masyarakat
Alue Naga	<ol style="list-style-type: none"> 1. Penyelenggaraan pemerintahan desa 2. Pelaksanaan pembangunan desa 3. Pembinaan kemasyarakatan 4. Pemberdayaan masyarakat
Peurada	<ol style="list-style-type: none"> 1. Penyelenggaraan pemerintahan desa 2. Pelaksanaan pembangunan desa 3. Pembinaan kemasyarakatan 4. Pemberdayaan masyarakat

Tabel 4.4

Penggunaan Dana Desa di Kecamatan Syiah Kuala

4.4 Pengalokasian Dana Desa Untuk Program Pemberdayaan Perempuan

Dalam pengalokasian dana desa, program pemberdayaan menjadi prioritas utama disamping program pembangunan dan program-program lainnya. Salah satu yang menjadi fokus utama dalam program pemberdayaan adalah pemberdayaan perempuan. Keterlibatan perempuan dalam perencanaan dalam perencanaan pengalokasian dana desa menjadi suatu bukti bahwa dana desa berpengaruh terhadap pemberdayaan perempuan. Rata-rata desa di kecamatan Syiah Kuala melibatkan unsur perempuan dalam musrembang gampong untuk pengalokasian dana desa. Hal ini seperti yang disampaikan oleh aparatur desa Lamgugop

“dalam setiap perencanaan dana desa kita selalu melibatkan tokoh masyarakat seperti PKK, KPM” (AD1, 2019).

Hal serupa juga disampaikan oleh aparatur desa lainnya seperti halnya yang disampaikan oleh aparatur desa gampong Jeulingke. Ia mengatakan bahwa:

“Dalam musrembang gampong kita selalu melibatkan kaum perempuan, mereka tidak hanya datang untuk mendengar saja tapi kita meminta mereka untuk memberikan saran tentang program apa yang memang menjadi skala prioritas untuk kita terapkan” (AD2, 2019).

Keterlibatan perempuan dalam musrembang dan perencanaan setiap kegiatan gampong menunjukkan bahwa semakin pentingnya peran perempuan. Hal ini membuktikan bahwa perempuan semakin terberdaya, perempuan tidak lagi

dipandang hanya sebagai untuk mengurus rumah tangga saja, tetapi perempuan juga terlibat dalam kekuatan-kegiatan penting dalam suatu desa.

Selain melibatkan perempuan dalam musrembang gampong, desa juga menunjukkan perhatiannya untuk memberdayakan perempuan melalui program-program pemberdayaan perempuan yang dilaksanakan melalui alokasi dana desa. Beberapa program yang telah dijalankan diantaranya berupa pelatihan, sosialisasi, maupun program lain yang melibatkan perempuan seperti program padat karya tunai yang dilaksanakan di desa Tibang. Aparatur gampong tibang menyebutkan bahwa:

“program padat karya tunai adalah adalah program nasional dimana kita mempekerjakan perempuan dan kita berikan gaji harian dari dana desa”
(AD3, 2019)

Beberapa pekerjaan dalam program padat karya tunai desa Tibang adalah Penanaman rumput dilapangan dan pembersihan parit dimana pekerjaannya adalah perempuan. Selain program padat karya tunai, desa Tibang juga membuat kegiatan perempuan lain berupa pelatihan yaitu pelatihan tata rias dan pengolahan ikan.

Program-program pelatihan dan sosialisasi juga dibuat di desa lain yang ada di kecamatan Syiah Kuala seperti di desa Lamgugob. Beberapa program pemberdayaan perempuan yang telah dijalankan diantaranya adalah Pelatihan tenun, bantuan modal, pelatihan tanaman hidroponik, buat sabun cair, merangkai sirih, sampai kepada bantuan sembako untuk warga yang kurang mampu. Wawancara dengan aparat desa lamgugop, ia mengatakan bahwa:

“Alhamdulillah, dari pelatihan yang sudah kita buat. Orang itu melanjutkan menjadi usaha bukan hanya sekedar ikut pelatihan saja, mereka sudah mempunyai pendapatan dari penjualan produk yang dibuatnya” (AD1, 2019)

Semua desa di Kecamatan Syiah Kuala menerapkan program pemberdayaan perempuan baik berupa pelatihan maupun program lainnya. Hasil wawancara dengan aparat gampong masing-masing desa di kecamatan Syiah Kuala tentang program pemberdayaan perempuan yang telah dilaksanakan yaitu

gampong perada membuat program sosialisasi pra nikah, pelatihan menjahut spreng, pelatihan membuat tudung saji, pelatihan pembuatan sabun, dan koperasi syariah. Ie Masen Kaye Adang membuat pembinaan keluarga yaitu pembinaan untuk calon pengantin dan sosialisasi kesehatan ibu dan anak. Desa Pineung telah menjalankan program pelatihan jilbab syari dan untuk kedepan telah merencanakan pelatihan penanaman hidroponik. Rukoh telah menjalankan program pembuatan kue sehat dan pelatihan fardhu kifayah. Kopelma Darussalam telah menjalankan program pelatihan menjahit, pelatihan membuat kue, dan sosialisasi reproduksi. Deyah raya telah menjalankan program penyuluhan KB, pelatihan kader PKK, pelatihan kue kreasi, dan pelatihan computer.

Terdapat dua desa yang belum menjalankan program pemberdayaan perempuan yaitu desa Alue Naga dan desa Jeulingke. Wawancara dengan aparat desa Alue Naga, ia menyebutkan bahwa:

“Untuk desa Alue Naga sekarang ini belum ada, paling kalau ada hanya satu yaitu marhaban. Mungkin nanti tahun 2020 ada karena kita sedang memfokuskan pada pembangunan fisik, masih banyak yang perlu kita buat seperti irigasi masih banyak yang belum ada dibelakang itu” (AD4, 2019)

Berbeda halnya dengan desa Alue Naga, desa Jeulingke sudah mengusulkan berbagai program pemberdayaan perempuan pada tahap ke III. Wawancara dengan aparat desa Jeulingke, ia menyebutkan bahwa:

“ada beberapa program pemberdayaan perempuan yang belum terealisasikan, kita sudah mengusulkan insyaAllah akan kita jalankan pada pencairan tahap ke III”. (AD2, 2019)

Beberapa program pemberdayaan perempuan yang telah diusulkan adalah pelatihan kader PKK, pelatihan pembuatan kue kering, dan peningkatan kapasitas aparat gampong.

Berbagai program pemberdayaan perempuan yang telah dijalankan menimbulkan berbagai dampak terhadap masyarakat perempuan itu sendiri. Wawancara dengan masyarakat, ia mengatakan:

“saya pernah mengikuti beberapa kegiatan yang dibuat oleh desa, saya mengambil banyak manfaat dari kegiatan tersebut terutama kegiatan padat karya tunai tunai. Alhamdulillah saya sangat terbantu ketika ada kegiatan tersebut” (M1, 2019)

Pengakuan lain juga disampaikan oleh seorang pengurus PKK dalam salah satu desa yang ada di kecamatan Syiah Kuala. Ia menyampaikan

“kami sangat berterimakasih atas adanya dana desa, dana desa sangat membantu ibu-ibu yang ada disini” (M2, 2019)

Hal yang sama juga disampaikan oleh masyarakat di desa lain yang ada di kecamatan Syiah Kuala. Ia mengatakan:

“dari beberapa program yang pernah saya ikuti, saya mendapatkan banyak sekali manfaat. Dari sebelumnya saya tidak tau mengenai hal tersebut, setelah mengikuti pelatihan saya jadi tau” (M3, 2019)

Pernyataan yang hampir sama juga diucapkan oleh seorang masyarakat ketika diwawancarai, ia mengatakan:

“saya pernah ikut beberapa kegiatan, tapi tidak semua kegiatan saya ikut. Hanya beberapa saja dan Alhamdulillah manfaat yang saya rasakan itu banyak. Saya jadi mengerti bagaimana cara membuatnya dan ada juga ibu-ibu yang telah ada usaha dari hasil pelatihan itu.” (M4, 2019)

Masyarakat tidak semuanya mendapat manfaat dari program pemberdayaan perempuan yang telah dibuat oleh desa dikarenakan beberapa alasan. Kebanyakan masyarakat yang tidak merasakan manfaat tersebut adalah masyarakat yang tidak ikut serta dalam kegiatan yang dilaksanakan oleh desa baik karena tidak tau tentang kegiatan tersebut maupun karena memang tidak mau

mengikuti kegiatan yang dibuat oleh desa. Hal ini seperti yang disampaikan oleh seorang warga yang ada di kecamatan Syiah Kuala, ia mengatakan:

“saya tau mengenai kegiatan tersebut, tapi memang saya tidak ikut. Saya pernah ikut kegiatan desa itu sekali dulu. Sekarang karna anak masih kecil tidak bisa ditinggal jadi saya tidak lagi kegiatan-kegiatan perempuan itu” (M1.2, 2019).

Dari pengakuan masyarakat bahwa semua yang terlibat dalam pemanfaatan dana desa (mengikuti kegiatan perempuan yang dibuat desa) mendapatkan manfaat yang besar sekali, artinya pengalokasian dana desa untuk program pemberdayaan perempuan mendatangkan banyak manfaat positif terhadap masyarakat khususnya perempuan. Perempuan menjadi lebih aktif dalam berbagai kegiatan, suara perempuan sudah lebih diperhitungkan untuk perencanaan setiap kegiatan desa karena melibatkan unsur perempuan dalam perencanaannya.

4.5 Faktor Pendukung Dan Penghambat Jalannya Program Pemberdayaan Perempuan

Sukses atau tidaknya sebuah kegiatan sangat dipengaruhi oleh beberapa faktor-faktor tertentu baik faktor pendukung maupun penghambat. Faktor-faktor tersebut menjadi penentu kesuksesan sebuah kegiatan dalam desa.

4.5.1 Faktor pendukung

1. Partisipasi masyarakat

Partisipasi Masyarakat adalah keterlibatan seseorang atau pun suatu kelompok (masyarakat) secara aktif dalam berkontribusi dengan sukarela pada sebuah program pembangunan, seperti terlibat dalam hal perencanaan, pelaksanaan, monitoring dan juga sampai evaluasi.

Salah satu faktor yang mendukung terlaksananya program pemberdayaan perempuan di kecamatan Syiah Kuala adalah partisipasi masyarakat yang baik. Masyarakat cukup merespon setiap program yang dibuat oleh desa. Partisipasi masyarakat dapat dilihat dari antusias masyarakat dalam mengikuti kegiatan yang dilaksanakan oleh desa. Hal tersebut sejalan dengan apa yang disampaikan oleh seorang aparatur desa, ia mengatakan:

“kemauan masyarakat dari pihak perempuan sangat tinggi. Kalau di desa kita untuk menjalankan program perempuan sangat membantu dan mendukung, tidak ada yang menolak” (AD 5, 2019).

Hal serupa juga disampaikan oleh aparatur desa lain, ia mengatakan:

“kami disini pribadi antusiame masyarakat untuk kegiatan pemberdayaan perempuan itu sangat luar biasa karena dibuat dan dikelola oleh orang-orang yang professional” (AD6, 2019)

Hal serupa juga disampaikan oleh semua aparatur gampong yang ada di kecamatan Syiah Kuala yang telah menjalankan program pemberdayaan perempuan bahwa antusias masyarakat untuk mengikuti program pemberdayaan perempuan sangat besar dan respon masyarakat untuk program pemberdayaan perempuan juga sangat baik.

2. Sarana dan Prasarana

Sarana adalah segala sesuatu yang dapat dipakai sebagai alat dalam mencapai maksud atau tujuan. Sedangkan prasarana adalah segala sesuatu yang merupakan penunjang utama terselenggaranya suatu kegiatan. Tidak dapat dipungkiri bahwa ketersediaan sarana dan prasarana sangat berpengaruh terhadap jalannya suatu kegiatan seperti yang disampaikan oleh apatur salah satu desa yang ada di kecamatan Syiah Kuala, ia mengatakan:

“Faktor yang mendukung jalannya kegiatan salah satunya adalah fasilitas untuk menunjang kegiatan seperti gedung pertemuan” (AD7, 2019)

Hal yang sama juga disampaikan oleh aparaturnya desa lain yang ada di kecamatan Syiah Kuala, ia mengatakan:

“kalau untuk faktor pendukung pendukung disini ada sarana dan prasarana misalnya adanya tempat untuk membuat kegiatan” (AD8, 2019)

Berdasarkan informasi tersebut jelas bahwa sarana dan pra sarana mempengaruhi kesuksesan jalannya program pemberdayaan perempuan.

4.5.2 Faktor Pengambat

Sumber Daya Manusia merupakan faktor penting dalam proses pengelolaan Alokasi Dana Desa. Peran dan pentingnya Sumber Daya Manusia dalam Instansi Pemerintahan dan masyarakat adalah bahwa segala potensi sumber daya yang dimiliki manusia yang dapat dimanfaatkan sebagai usaha untuk meraih keberhasilan dalam mencapai tujuan baik secara pribadi individu maupun di dalam instansi. Sumber daya tersebut meliputi tenaga dan kemampuan manusia (baik daya pikir serta daya fisiknya) benar-benar dapat dimanfaatkan secara terpadu dan secara optimal. Sumber Daya Manusia sebagai faktor pertama dan utama dalam proses pembangunan dan pencapaian tujuan Pemerintahan. Wawancara dengan pengurus PKK salah satu desa di kecamatan Syiah Kuala, ia mengatakan:

“faktor penghambatnya salah satunya adalah kurangnya sumber daya manusia yaitu kurangnya tenaga yang terampil dalam desa untuk membimbing masyarakat dan kurangnya sarjana di kampung kita ini” (M3.2, 2019)”

Selain dengan sdm yang kurang memadai, keterbatasan waktu dan juga kehadiran masyarakat saat kegiatan juga menjadi suatu hambatan dalam program pemberdayaan perempuan seperti yang disampaikan oleh aparaturnya desa Peurada, ia mengatakan:

“hambatan pasti ada yang pertama adalah dari segi kehadiran. Kita sudah mengundang tapi yang bersangkutan tidak hadir dengan segala macam alasan seperti sibuk. Selain itu keterbatasan waktu juga hambatan buat kita, pelatihan di kampung paling lama 2 hari dan penyerapan ilmu yang disampaikan juga kurang maksimal bisa jadi karena alasan latar belakang pendidikan”. (AD7, 2019)

Berbeda halnya dengan desa lain, aparaturnya desa Tibang justru mengemukakan alasan lain yang menghambat jalannya program pemberdayaan perempuan yaitu menyangkut dengan mindset masyarakat. Ia mengatakan:

“hambatan yang kita hadapi adalah mindset masyarakat. Masyarakat hanya memikirkan pembangunan saja” (AD3, 2019)

Selain faktor-faktor tersebut, keterbatasan anggaran juga menjadi hambatan dalam melaksanakan program pemberdayaan perempuan. Hal ini disampaikan oleh aparaturnya desa Rukoh, ia mengatakan:

“hambatan dalam menjalankan program ada, yaitu keterbatasan anggaran karena kita disini banyak lembaga-lembaga dalam menjalankan roda pemerintahan. Jadi itu merupakan suatu hambatan. Anggarannya tidak sesuai dengan apa yang dibutuhkan” (AD5, 2019)

Laporan yang rumit dan pembatasan uang saku juga menjadi sebuah hambatan dalam menjalankan program pemberdayaan perempuan seperti yang disampaikan oleh aparaturnya desa Jeulingke.

Berdasarkan informasi tersebut masih banyak hambatan-hambatan dalam melaksanakan program pemberdayaan perempuan yaitu SDM yang kurang memadai, keterbatasan waktu, kehadiran masyarakat, mindset masyarakat, keterbatasan anggaran dan rumitnya pelaporan dari kegiatan yang dilaksanakan.

4.6 Harapan

Berbagai harapan sempat disampaikan oleh informan ketika berlangsungnya wawancara seperti yang disampaikan oleh aparatur desa Jeulingke, ia menyampaikan:

“aspirasi masyarakat dalam musrembang gampong ada yang tidak tertampung, harapannya ada asas keadilan dan pemerataan. Aspirasi-aspirasi masyarakat harus di tampung semua” (AD2, 2019)

Dukungan dari pemerintah kota juga sangat diharapkan oleh aparatur gampong. Selain itu harapan juga disampaikan oleh aparatur desa Tibang, ia mengatakan:

“harapan kami semoga dana desa tetap ada, ditingkatkan dan tidak dibatasi penggunaannya. Kami juga mengharapkan pengalokasian dana desa harus diprioritaskan sesuai dengan karakter desa dan peningkatan pada pendamping desa”. (AD3, 2019)

Harapan yang sama juga disampaikan oleh aparatur desa Lamgugob yang mengharapkan agar dana desa ditingkatkan dan saran dari pemerintah yang lebih tinggi. Aparatur desa Pineung mengharapkan agar aturan plot dana untuk perempuan ditingkatkan. Ia mengatakan:

“Semoga kedepannya aturan plot dana untuk program pemberdayaan perempuan ditingkatkan karna kami disini pribadi antusiame masyarakat untuk kegiatan pemberdayaan perempuan itu sangat luar biasa karena dibuat dan dikelola oleh orang-orang yang profesional” (AD6, 2019)

Harapan yang sama juga disampaikan oleh aparatur desa rukoh yang mengharapkan penambahan anggaran untuk perempuan dengan tidak memangkas plot dana lain. Harapan dari aparatur gampong Kopelma Darussalam adalah tingkat kota lebih intensif terhadap kegiatan yang melibatkan gampong.

Selain harapan dari aparatur gampong, masyarakat pun sempat menyampaikan harapannya ketika proses wawancara. Harapan dari masyarakat adalah agar pemerintah kota mengkhususkan aturan penyaluran dana program pemberdayaan perempuan. Ia mengatakan:

“harapan saya semoga kedepan ada disalurkan dana untuk kegiatan yang membangun, seharusnya ada sesuatu yang bisa kita dapat setelah

pelatihan, dan satu lagi semoga pemerintah kota mengkhususkan aturan penyaluran dana program pemberdayaan perempuan” (M3.2, 2019).

Harapan lain juga disampaikan oleh masyarakat Peurada, ian menyampaikan:

“semoga kedepan gaji untuk kader PKK ditingkatkan, per bulan kami hanya menerima Rp100.000. semoga kedepannya bisa ditingkatkan lagi”.
(M4, 2019)

BAB V KESIMPULAN DAN SARAN

5.1 Kesimpulan

Berdasarkan pembahasan , maka dapat ditarik kesimpulan antara lain:

1. Dari pengakuan masyarakat bahwa semua yang terlibat dalam pemanfaatan dana desa (mengikuti kegiatan perempuan yang dibuat desa) mendapatkan manfaat yang besar sekali, artinya pengalokasian dana desa untuk program pemberdayaan perempuan mendatangkan banyak manfaat positif terhadap masyarakat khususnya perempuan. Perempuan menjadi lebih aktif dalam berbagai kegiatan, suara perempuan sudah lebih diperhitungkan untuk perencanaan setiap kegiatan desa karena melibatkan unsur perempuan dalam perencanaannya
2. Faktor-faktor yang mendukung jalannya program pemberdayaan perempuan yaitu partisipasi masyarakat serta sarana dan pra sarana. antusias masyarakat untuk mengikuti program pemberdayaan perempuan sangat besar dan respon masyarakat untuk program pemberdayaan perempuan juga sangat baik. Sarana dan pra sarana juga sangat mempengaruhi kesuksesan jalannya program pemberdayaan perempuan.
3. Faktor-faktor penghambat jalannya program pemberdayaan perempuan adalah sumber daya manusia, keterbatasan waktu, mindset masyarakat, keterbatasan anggaran, dan sulitnya pelaporan.

5.2 Saran

Adapun saran yang dapat diberikan penulis dalam penelitian ini adalah:

1. Untuk hal yang bersifat positif, diharapkan kedepannya agar diteruskan dan bahkan lebih ditingkatkan lagi
2. Untuk hal yang bersifat negatif, perlu pengawasan yang lebih dari pemerintah guna mencapai hal yang diharapkan.
3. Penggunaan dana desa disesuaikan dengan karakter desa karena yang tau kebutuhan desa adalah masyarakat desa itu sendiri

DAFTAR PUSTAKA

- Abdur Rozaki, dkk. 2005. *Prakarsa desentralisasi dan Otonomi Desa*. Yogyakarta: Ire Press
- Ambar, Teguh Sulistiyani. 2004, *Kemitraan dan Model-Model Pemberdayaan*. Yogyakarta: Gava Media.
- Asep Herry Hermawan, dkk. (2009). *Pengembangan Kurikulum dan Pembelajaran*. Jakarta : Universitas Terbuka.
- A.M.W. Panarka dan Vidyandika Moeljarto, 1996, *Pemberdayaan (Empowerment)*, Penyunting : Onny S. Priyono dan A.M.W. Pranarka, *Pemberdayaan Konsep, Kebijakan dan Implementasi*, CSIS, Jakarta
- Bainar dan Aichi Halik. 1999. *Jagat Wanita dalam Pandangan Para Tokoh Dunia*. Jakarta: Pustaka CIDESINDO.
- Herdiansyah, Haris. 2010. *Metode Penelitian Kualitatif Untuk Ilmu-Ilmu Sosial*. Jakarta: Salemba humaneka
- Ife, (1997) *Community Development: Alternatif Pengembangan Masyarakat di Era Globalisasi*. Yogyakarta: Penerbit Pustaka Pelajar
- Kartasasmita, G. 1996. *Pembangunan untuk Rakyat: Memadukan Pertumbuhan dan Pemerataan*. Jakarta : CIDES
- Nugroho, Riant. 2008. *Public Policy* PT Elex Media Komputindo: Jakarta
- Sidik, Mahfud. 2002. *Optimalisasi pajak daerah dan retribusi daerah dalam rangka meningkatkan kemampuan keuangan daerah*. Bandung
- Slamet. 2003. *Pembangunan Masyarakat Berwawasan Partisipasi*. Surakarta: Sebelas Maret University Press.
- Soekanto, Soerjono. 1987. *Sosiologi Hukum dalam Masyarakat*. Rajawali. Jakarta
- Sugiyono, 2009. *Metode Penelitian Kuantitatif, kualitatif dan R&D*. Bandung: Alfabeta
- Sukirno, Sadono. 2006. *Ekonomi Pembangunan*. Jakarta: Kencana
- Sumardjo, 1999. *Transformasi Model Penyuluhan Pembangunan Menuju Pengembangan Kemandirian Petani*. Disertasi. Bogor: Institut Pertanian Bogor
- Syahbrani, Warka. 2012. *Akuntansi dan Akuntabilitas Pemerintah Desa*. Tugas Akhir Mata Kuliah. Program Magister Sains Akuntansi. Fakultas Ekonomi dan Bisnis. Yogyakarta: Universitas Gajah Mada
- Tohar, M, 2003. *Membuka Usaha Kecil*. Yogyakarta: Kanicius
- Wrihatnolo, Randy.R, dan Riant Nugroho D, 2007. *Manajemen Pemberdayaan : Sebuah Pengantar dan Panduan untuk Pemberdayaan Masyarakat*. PT Elex Media Komputindo Kelompok Gramedia. Jakarta

LAMPIRAN

Lampiran 1

Pedoman Wawancara

Pertanyaan untuk aparaturnya desa

1. Untuk apa saja dana desa digunakan?
2. Berapa besaran dana desa yang diterima?
3. Apakah dana desa ada digunakan untuk kegiatan pemberdayaan perempuan?
4. Berapa total dana desa yang diplot untuk kegiatan pemberdayaan perempuan?
5. Apakah perempuan dilibatkan dalam perencanaan dana desa?
6. Program apa saja yang telah dijalankan untuk kegiatan pemberdayaan perempuan yang bersumber dari dana desa?
7. Bagaimana dampak yang dihasilkan dari kegiatan pemberdayaan perempuan tersebut?
8. Faktor-faktor apa saja yang mendukung jalannya program pemberdayaan perempuan?
9. Faktor-faktor apa saja yang menghambat jalannya program pemberdayaan perempuan?
10. Langkah-langkah apa saja yang masih perlu dilakukan untuk menyelesaikan program pemberdayaan perempuan?

Pertanyaan untuk masyarakat (khusus perempuan)

1. Apakah ibu tau tentang dana desa?
2. Bagaimana pendapat ibu tentang pengalokasian dana desa?
3. Apakah dana desa ada disalurkan untuk kegiatan pemberdayaan perempuan?
4. Apakah ibu dilibatkan dalam pemanfaatan dana desa?
5. Program apa saja yang sudah dilaksanakan dari pengalokasian dana desa untuk program pemberdayaan perempuan?
6. Apakah ibu dilibatkan dalam semua program tersebut?
7. Program pemberdayaan apa saja yang sudah ibu ikuti?
8. Sejauh mana ibu mengikuti program tersebut?
9. Apa manfaat yang ibu dapatkan dari program pemberdayaan perempuan yang dilaksanakan tersebut?
10. Apa dampak dari dana desa yang ibu dapatkan?

Lampiran 2

Dokumentasi penelitian



